

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
SUMATERA UTARA**
**IMPLEMENTATION OF ACCURAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS IN THE REGIONAL OFFICE OF THE NATIONAL LAND AGENCY
(BPN) NORTH SUMATRA**

Oleh:

Khoirul Yahya¹, Juliana Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

e-mail: Khoirulyahya06@gmail.com¹; juliananasution@uinsu.ac.id²

Sejarah Artikel: Diterima Maret 2022, Disetujui April 2022, Dipublikasikan Juni 2022

ABSTRAK

Pemerintah telah menetapkan putusan mengenai reformasi bidang akuntansi pemerintahan dimana pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan Kanwil BPN Sumut khususnya penyusun laporan keuangan telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual dengan baik. Dalam pengelolaan SDM telah dilakukan pelatihan dan sosialisasi walaupun tidak dilakukan secara berkala. Disamping itu jumlah SDM dan latar belakang pendidikan serta kompetensi penyusun laporan keuangan juga sudah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dari sudut pandang pengelolaan teknologi dan informasi, Kanwil BPN Sumut menggunakan aplikasi yang merupakan produk dari KPPN yaitu aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, E-Rekon, Aplikasi Persediaan yang sangat membantu dalam penyusunan aplikasi berbasis akrual.

Kata Kunci: Implementasi Akruwal, Pemerintah, Standar Akuntansi

ABSTRACT

The government has issued a decision regarding the reform of the government accounting sector, which is Government Regulation (PP) number 71 of 2010 as a replacement for PP number 24 of 2005 concerning Government Accounting Standards prepared by the Government Accounting Standards Committee (KSAP). The objective of this research was to determine and analyze the implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Human Resources (HR) management and technology and information management aspects at the Regional Office of the National Land Agency (BPN) of North Sumatra. The method used in this research was a qualitative method through a phenomenological approach. The results showed that the Regional Office of the North Sumatra BPN, especially the financial statements, had implemented the Government Accounting Basis well. In HR management, training and socialization have been carried out, although it was not regular. In addition, the number of human resources and educational backgrounds and preparing reports also meet the required qualifications. From the technology and information management point of view, the BPN Regional Office of North Sumatra used applications that were products of KPPN, called the SAIBA application, SIMAK BMN, E-Rekon, and Inventory applications which were very helpful in preparing accrual-based applications.

Keywords: Accrual Implementation, Government, Accounting Standards

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menggambarkan bagaimana suatu instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada stakeholder dan masyarakat umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen (penyusun dan penyaji laporan keuangan (Suherman & Susanti, 2017). Laporan keuangan yang disajikan suatu instansi pemerintah sudah semestinya memuat informasi yang berkualitas. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam hal ini, jenis akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah ialah akuntansi publik (Munawar, 2016). Pesatnya perkembangan akuntansi di Indonesia membawa reformasi keuangan negara yaitu adanya perubahan penerapan akuntansi berbasis kas menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual. Perubahan ini diharapkan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat (Satrio et al., 2016).

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti dari PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Dimana PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa dalam jangka paling lama empat tahun sap menuju kas berbasis akrual berlaku bagi entitas yang belum memiliki kesiapan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Artinya tahun 2015 akuntansi berbasis akrual wajib diimplementasikan (Kementerian Keuangan RI, 2010).

Menurut PSAP 01 Basis Akrual adalah basis akuntansi dengan melakukan pencatatan transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, baik adanya penerimaan kas atau setara kas ataupun tidak (Mahardini & Miranti, 2018).

Akuntansi berbasis akrual dapat diartikan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi diakui dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya suatu transaksi walaupun kas belum diterima. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dapat menyajikan informasi yang komprehensif karena seluruh transaksi ekonomi dan arus sumberdaya di catat. (Maryati et al., 2015) menyatakan bahwa penggunaan akuntansi

berbasis akrual adalah ciri khas praktek pemerintah modern dalam mengelola keuangan. Dengan adanya pelaporan berbasis akrual ini, pengguna lebih mudah dalam mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, dimana didalamnya terdapat informasi bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga kapasitas pemerintah yang sesungguhnya dapat diukur. (Sari & Putra, 2012).

Menurut (Purwanti, 2018) implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membawa berkah. Karena Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat menyajikan informasi seluruh posisi keuangan yang terdiri dari posisi aset, utang dan kekayaan bersih dari suatu entitas termasuk pemerintahan.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menerapkannya dengan praktik. Walaupun pada dasarnya aparatur pemerintah sudah dibekali pengetahuan dan skill yang cukup namun masih ada beberapa masalah yang timbul seperti background aparatur negara yang menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan akuntansi sehingga sering timbul kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan dan dalam penginputan data ke sistem. Maka dari itu penting adanya sumber daya manusia yang kompeten.

(Safitri et al., 2015) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual ialah sumber daya manusia yang kompeten, komunikasi, komitmen organisasi serta gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ditambah dengan sistem informasi yang mendukung serta kemauan dari diri sendiri. Namun, (Sukriani et al., 2018) menyatakan bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten harus dibarengi dengan pelatihan, pengalaman kerja, penggunaan teknologi informasi dan background pendidikan yang sesuai. Dalam penelitiannya (Rosydiana & Gunawan, 2017) juga menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh pada pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara sejauh ini sudah menerapkan akuntansi basis akrual yang baik. Dibuktikan dengan penyusunan laporan

keuangan yang sudah memenuhi standar dan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Misalnya penggunaan aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual seperti aplikasi SAIBA yaitu adalah aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Lalu ada aplikasi SIMAK BMN yaitu sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Lalu aplikasi E-Rekon yaitu aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara. Dan ada aplikasi Persediaan yaitu aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk merekam transaksi barang persediaan yang outputnya berupa laporan persediaan yang akan menjadi bagian dari laporan BMN dan selanjutnya akan menjadi bagian dari neraca. (Kanwil BPN Sumut, 2020).

Disamping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) BPN Kanwil Sumut dalam menyusun laporan keuangan sudah kompeten dibuktikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan sudah lulus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, kurangnya pelatihan terhadap SDM membuat staf penyusun laporan keuangan harus belajar autodidak sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam meningkatkan kompetensi penyusun laporan keuangan. Disamping itu, timbul beberapa masalah dalam menjalankan akuntansi berbasis akrual tersebut seperti aplikasi Persediaan yang mengalami masalah ketika menggunakan sistem persediaan FIFO (First in First Out) dimana sistem kadang mengalami error sehingga akan berimbas pada buku persediaan yang bernilai negatif.

Berdasarkan fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa Kanwil BPN Sumut masih menghadapi masalah. Walaupun tidak fatal permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan standard an aturan yang berlaku yang sebagaimana mestinya. Jika hal ini diatasi tentunya menciptakan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang,

dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara”.

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kanwil BPN Sumut dan untuk mengetahui implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam aspek pengelolaan Teknologi Informasi pada Kanwil BPN Sumut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Penulis mengamati fenomena dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut (Anggi dan Setiawan, 2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data secara alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan peneliti adalah sebagai instrumen instrument kunci. Penelitian ini dilakukan berawal dari keinginan dan ketertarikan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan yaitu bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Kanwil BPN Sumatera Utara.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu dengan observasi (pengamatan) dan wawancara. Menurut (Rukajat Ajat, 2018) Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Artinya teknik pengamatan ini digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang tampak benar-benar terjadi dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut (Hadi & Haryono, 2007 ; Emzir 2010) dalam (Fitrah Muh dan Luthfiyah, 2017) wawancara adalah dialog tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dimana pewawancara harus membantu subjek untuk menyelesaikan suatu masalah. Wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data atau informasi yang dibutuhkan. Kedua teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat membantu memperoleh hasil penelitian tentang bagaimana implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual baik dari aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia maupun dari aspek pengelolaan Teknologi Informasi.

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan fenomenologi (*Phenomenology*). Menurut (Sugianto Eko, 2015) penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung terhadap tafsiran individual mengenai pengalaman-pengalamannya.

Teknik analisis data dalam suatu penelitian bersifat penting. Karena analisis data dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2010) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yaitu dari observasi dan wawancara yang dilakukan maupun melalui teknik pengumpulan data yang lain.

Setelah data yang diperlukan terkumpul melalui teknik pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga diperoleh gambaran secara umum tentang keadaan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Entitas berkedudukan di Jalan Brigjend Katamsi No.45 Medan, Sumatera Utara.

Upaya Kanwil BPN Sumut Dalam Implementasi SAP Berbasis Akruwal

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara berkomitmen dengan visi mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program berkelanjutan yang berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan periode Desember merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Pasal 4 ayat (1) PP nomor 71 tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan penyajian LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan dengan basis akrual. Maka dari itu, Kanwil BPN Sumut telah menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kanwil BPN Sumut wajib mengikuti aturan yang mengharuskan penerapan SAP berbasis Akrual. Penyesuaian pada perubahan aturan yang ada menimbulkan dampak pada sistem penatausahaan keuangan Kanwil BPN Sumut sehingga Kanwil BPN Sumut perlu merencanakan sumber daya yang mumpuni. Sumber daya manusia adalah unsur penting yang harus disiapkan karena merupakan sumber daya paling memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung khususnya pada penyusunan dan penyajian LK. Seiring meningkatnya penerapan SAP berbasis akrual maka meningkat pula kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Maka sangat penting jika Kanwil BPN Sumut menyusun perencanaan SDM yang mutakhir dan mahir di bidang akuntansi pemerintahan khususnya sosialisasi tentang implementasi berbasis akrual. Pelatihan/Workshop mengenai SAP basis akrual sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Dengan adanya pelatihan/workshop pemerintah menaruh harapan kepada pemangku kepentingan memahami implementasi SAP berbasis akrual dan dapat membangun kerjasama untuk menghasilkan output berupa pencapaian opini terbaik. Wawancara dengan salah satu pegawai bagian keuangan dan BMN (Operator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/UAPPA-W).

“*Workshop* dan pelatihan tentang SAP berbasis akrual sendiri telah dilaksanakan pada awal 2015, namun ada beberapa yang mengikuti dan ada yang tidak. Workshop

dan pelatihan sebenarnya sangat jarang dilaksanakan secara komprehensif. Dalam penerapan SAP basis akrual Operator lebih sering belajar autodidak dan menanyakan sendiri kepada pihak KPPN jika ada yang ingin ditanyakan.”

Dalam hal pelatihan/*workshop* Kanwil BPN Sumut masih jarang menerapkannya padahal salah satu aspek penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan berkualitas adalah melalui sumber daya manusia yang kompeten. Untuk menjadi SDM yang kompeten salah satunya dengan cara sering berlatih dan mengasah kemampuan melalui pelatihan dan uji kompetensi.

Pemerintah telah berupaya dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dibidangnya yaitu implementasi SAP berbasis akrual. Kanwil BPN sendiri telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual dari aspek SDM diantaranya pelaksanaan Pelatihan dalam menjalankan aplikasi yang tersedia. Penempatan pegawai yang sesuai *background* pendidikan dan kompetensinya. Disamping itu jumlah SDM Pengelola Keuangan sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan Kanwil BPN Sumut. Kompetensi SDM yang ada di Kanwil BPN Sumut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan juga sudah baik dibuktikan dengan hasil audit WTP yang dinyatakan oleh BPK. Sesuai dengan penjelasan salah satu staf subbagian keuangan & BMN (Operator Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/UAKPA).

“Dalam penyusunan LK di Kanwil BPN Sumut SDM nya sendiri sudah cukup dan sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual tetap terlaksana dengan baik. Perlu di garis bawahi juga bahwa salah satu bukti bahwa SDM Kanwil BPN Sumut dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu kompeten ataupun baik ialah hasil penilaian audit WTP yang di keluarkan oleh BPK”.

Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi sangat berperan penting bagi perkembangan akuntansi agar dapat berjalan lancar dan efektif (Rosy Armaini, 2017). Salah satunya pada penerapan SAP Berbasis Akrual dengan Aplikasi

Terintegrasi yang tertuang dalam PMK No. 270/PMK.05/2014.

Salah satu produk pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) untuk mengembangkan dan mendukung SAP berbasis akrual di lingkungan Kanwil Sumut BPN Sumut ialah melalui aplikasi SAIBA, E-Rekon, SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu staf penyusun laporan keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas SAI UAPPA)

“Jadi kan semenjak tahun 2015 itu semua unit pemerintah itu harus sudah menerapkan basis kas menuju basis akrual sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Nah, keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektifitasnya dalam mempermudah operator/penyusun laporan keuangan dalam mengaplikasikan aturan tersebut untuk penerapan SAP berbasis akrual ini sendiri pemerintah sudah menyediakan sarana pendukung untuk menerapkan SAP berbasis akrual, yaitu misalnya dengan adanya aplikasi yang dikeluarkan dalam hal ini aplikasinya *made in* KPPN yang membantu para penyusun LK yang sesuai dengan standar & aturan. Seperti Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, e-Rekon dan Aplikasi Persediaan itu sangat membantu kami dalam menyusun laporan keuangan dengan basis akrual”

Adapun penjelasan dari aplikasi-aplikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual)

Aplikasi SAIBA adalah aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)

Aplikasi SIMAK BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

3. Aplikasi E-Rekon

Aplikasi E-Rekon adalah aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam proses

rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara.

4. Aplikasi Persediaan

Aplikasi Persediaan adalah aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk merekam transaksi barang persediaan yang outputnya berupa laporan persediaan yang akan menjadi bagian dari laporan BMN dan selanjutnya akan menjadi bagian dari neraca.

Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan wujud pengelolaan teknologi oleh pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah SDM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami khususnya di lingkungan Kanwil BPN Sumut.

Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut merupakan pencapaian Kanwil BPN Sumut dalam mengelola dan memanfaatkan Teknologi Informasi dibidang pengelolaan keuangan. Namun dibalik pencapaian tersebut masih timbul masalah pada sistem aplikasi yaitu pada aplikasi persediaan terkadang masih error jika data yang diinput merupakan metode FIFO sehingga berimbas pada buku persediaan yang sisanya akan bernilai negatif. Buku persediaan sisanya bernilai negatif/minus maka penyusun LK harus memulainya dari awal dengan menghapus semua transaksi dan menginput kembali. Hal tersebut akan menimbulkan manajemen waktu yang tidak efisien.

Kanwil BPN Sumut telah mengelola Teknologi Informasi dengan baik melalui aplikasi-aplikasi tersebut dimana dalam penerapannya Kanwil BPN bekerja sama dengan KPPN untuk mencapai visi Kanwil BPN Sumut yaitu mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.

PENUTUP

Implementasi SAP berbasis akrual pada Kanwil BPN Sumut dilakukan pada beberapa sudut pandang yaitu, dari sudut pandang pengelolaan SDM, Kanwil BPN Sumut telah mengikuti pelatihan dalam menjalankan aplikasi yang dikeluarkan oleh KPPN dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Disamping itu, Kanwil BPN Sumut telah memenuhi jumlah Sumber Daya Manusia

(SDM) dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan. Selain itu background pendidikan dan kompetensi SDM dalam penyusunan laporan keuangan pun sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada jabatan yang merangkap. Walaupun sebenarnya SDM di Kanwil BPN Sumut sudah mumpuni dan kompeten yaitu dibuktikan dengan hasil audit WTP dari BPK. Namun, kendala yang dihadapi tetap ada yaitu kurangnya pelatihan tentang SAP berbasis akrual bagi SDM penyusun laporan keuangan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan.

Dari sudut pandang pengelolaan Teknologi dan Informasi, Kanwil BPN Sumut menggunkan aplikasi yang merupakan produk dari KPPN yaitu aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual yaitu aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yaitu sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Aplikasi E-Rekon yaitu aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara. Dan Aplikasi Persediaan yaitu aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk merekam transaksi barang persediaan yang outputnya berupa laporan persediaan yang akan menjadi bagian dari laporan BMN dan selanjutnya akan menjadi bagian dari neraca. Dimana aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu penyusun laporan keuangan berbasis akrual untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kendala yang dihadapi ialah aplikasi Persediaan yang terkadang tidak dapat membaca data (error) jika transaksinya menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) tentunya akan berimbas pada buku persediaan yang bermasalah. Dan jika terjadi kesalahan pada buku persediaan, operatornya harus menghapus kembali transaksi dan mengulangi dari awal. Tentunya hal tersebut membuat manajemen waktu menjadi tidak efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang ditawarkan peneliti dalam

rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara yaitu perlu adanya pelatihan dalam menjalankan SAP Berbasis Akrual yang dilakukan secara berkala. Dengan tujuan untuk *upgrade* ilmu dan kompetensi SDM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual serta mengetahui *update* fitur aplikasi yang digunakan.

Dalam menghadapi masalah pada penggunaan aplikasi (dalam hal ini aplikasi Persediaan) maka pengguna melaporkannya kepada KPPN. Sebagai pihak penyedia aplikasi KPPN akan melakukan perbaikan dan peningkatan performa aplikasi agar tidak menghambat proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Sebenarnya kesalahan pada aplikasi muncul ketika pengguna melakukan kekhilafan dalam menjalankan aplikasi. Maka untuk menghindari kesalahan sistem (error) maka pengguna pun harus fokus dan penuh dengan kehati-hatian dalam menginput data pada aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albito Anggi, S. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PENELITIAN+KUALITATIF&ots=5HdzrygzIm&sig=YAJKmA12JSNJSRDWg8Clw0o7jEY&redir_esc=y#v=onepage&q=PENELITIAN+KUALITATIF&f=false
- Fitrah Muh dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV. Jejak. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UVRtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&ots=lrs2GDzkRN&sig=2sIyu5fq-a7bMK6Ijm0yJrIl-k&redir_esc=y#v=onepage&q=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&f=false
- Kementerian Keuangan RI. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1–413). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber

- Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.500>
- Maryati, U., Yentifa, A., & Andriani, W. (2015). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung). *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.100>
- Munawar, U. M. (2016). Model Akuntansi Berbasis AkruaL Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 18–34.
- Purwanti, L. (2018). Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Membawa Berkah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 173–191. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9011>
- Rosy Armaini. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(2), 71–86.
- Rosydiana, F., & Gunawan, B. (2017). Pengaruh Komunikasi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pemahaman Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening: Studi Empiris di SKPD dan Kecamatan Kab Sleman. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.18196/rab.020123>
- Rukajat Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qy1qDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA21&dq=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&ots=88BmwsDWGP&sig=cfeXhUurk2mViJDKAAZTToz1QD8&redir_esc=y#v=onepage&q=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&f=false
- Safitri, D., Yusralaini, Y., & Asri, F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 14–32.
- Sari, D. P., & Putra, H. S. (2012). Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen [Journal of Economic Accounting and Management]*, 11(2), 33–56. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780080443164000098>
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL diKabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59–70. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Sugianto Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. CV. Solusi Distribusi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jWjvDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&ots=X6S9YYsWhf&sig=IkS07bySMKUZ5WNvQcpIw8qPGJQ&redir_esc=y#v=onepage&q=PENELITIAN+KUALITATIF+SUGIYONO&f=false
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta.
- Suherman, A., & Susanti, Y. (2017). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 105–108. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.957>
- Sukriani, L., Eka Dianita Marvilianti Dewi, P., & Arie Wahyuni, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(3), 85–97.
- Sumut, K. B. (2020). Catatan Atas Laporan Keuangan. In *Engineering, Construction and Architectural Management* (Vol. 25, Issue 1, pp. 7–35). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034><https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>